



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 198 Telp. (0761) 32548, Fax (0761) 26624
Website : www.pta-pekanbaru.go.id Email: info@pta-pekanbaru.go.id
PEKANBARU – 28282

Nomor : 1267/KPTA.W4-A/OT1.6/X/2024 21 Oktober 2024
Sifat : Penting
Hal : Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dalam rangka mempersiapkan tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas dan kualitas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di tahun 2025. Maka kepada satuan kerja Wilayah Hukum PTA Pekanbaru, kami sampaikan hal-hal sebagai Berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan usaha yang telah dilakukan satuan kerja membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani, sehingga ada satker di tahun 2024 ini masuk penilaian ditahap seleksi administrasi oleh Tim Penilai Internal (TPI);
2. Satuan kerja lebih mengoptimalkan implementasi pembangunan Zona Integritas dengan meningkatkan Integritas, kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, (pedomani surat dirjen Nomor 1840/DJA/OT1/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Peradilan Agama);
3. Satuan kerja secara berkesinambungan meningkatkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh kordinator dan anggota tim pembangunan Zona Integritas terhadap keenam area pengungkit serta keterkaitan antara masing-masing area dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;
4. Satuan kerja memastikan memenuhi syarat pengusulan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. sebagai berikut:
 - a. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK/Hatibinwasda/Hatibinwasbid 100%;

- b. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%;
 - c. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)/Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan (bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN) 100% (*lihat Surat Edaran PermenPAN RB Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)*);
 - d. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan atau WBBM minimal 1 (satu) tahun;
 - e. Layanan yang diberikan sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi (permenpan RB No.5 Tahun 2024);
 - f. Predikat SAKIP minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK, dan “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM.
5. Satuan kerja memastikan terpenuhi nilai komponen hasil berupa:
 - a. Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Akuntabel minimal 18, 25 untuk menuju WBK, 19,50 untuk menuju WBBM, dengan menggunakan ukuran:
 - Nilai sub-Komponen Survei Persepsi Anti Korupsi Minimal 15,75 (survey 3,60)
 - Nilai sub-Komponen “Capaian Kinerja lebih baik” minimal 2,50 Menuju WBK, 3,75 menuju WBBM;
 - b. Kualitas Pelayanan Publik yang Prima minimal 14,00 (survey 3,20) menuju WBK, 15,5 (survey 3,60) Menuju WBBM
 6. Memastikan terhadap survei tersebut (poin 5), telah ditindaklanjuti dengkap dengan evidennya serta dipublikasikan melalui website maupun media publikasi lainnya;
 7. Memastikan rencana aksi dan monitoring rencana aksi agen perubahan telah dilaksanakan serta data inovasi berupa penjelasan inovasi yang telah berjalan 1 (satu) tahun dilengkapi dengan data pengguna inovasi terkini;
 8. Satuan kerja memastikan terpenuhi nilai Komponen Pengungkit dengan mempersiapkan data berupa eviden tahun 2024 yang dibutuhkan disetiap area, baik Aspek Pemenuhan maupun Aspek Reform;

9. Kepada satuan kerja agar di triwulan IV ini sudah mempersiapkan eviden implementasi pembangunan Zona Integritas tahun 2024 (sebagaimana pada poin 4,5 dan 8 diatas) sesuai ketentuan Peraturan PermenPAN RB Nomor: 90 Tahun 2021, hal ini tentunya dilakukan sebagai persiapan eviden untuk di upload ke dalam Aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2025;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam,
Ketua.



H. Zulkifli Yus

Tembusan.Kepada YTh.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan (KABAWAS) Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Wakil Ketua(Ketua Tim ZI) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.